

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
MASYARAKAT TUNAGRAHITA MELALUI PROGRAM RUMAH HARAPAN
(STUDI KASUS DI DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG
KABUPATEN PONOROGO)**

Dian Nikmal Anugrawati

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
diannikmal@gmail.com

Galih Wahyu Pradana

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
galihpradana@unesa.ac.id

Abstrak

Salah satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan adalah kemiskinan. Permasalahan kemiskinan yang dapat kita jumpai pada salah satu desa yang ada di Kabupaten Ponorogo yaitu di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong. Permasalahan kemiskinan ini dibarengi dengan adanya beberapa masyarakatnya yang menderita tunagrahita. Terciptanya ide pembentukan program khusus untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang dialami oleh masyarakat tunagrahita, program tersebut dinamakan Rumah Harapan, yang terdiri dari dua jenis kegiatan yaitu beternak hewan dan kerajinan tangan. Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang dilakukan dengan cara mencari data yang berkaitan dengan penelitian, seperti: catatan, transkrip, buku, surat kabar dan data lainnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Teknik analisis data yang digunakan merupakan teknik analisis data menurut Krippendorff. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tahapan program pemberdayaan masyarakat tunagrahita melalui program rumah harapan, adapun beberapa tahapan pemberdayaan masyarakat yaitu pertama, mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah permasalahan, serta peluang-peluangnya; kedua, menyusun rencana kegiatan kelompok; ketiga, menerapkan rencana kegiatan kelompok; keempat, memantau proses hasil kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Tunagrahita Melalui Program Rumah Harapan telah dilaksanakan dengan cukup baik. Saran dari penelitian ini adalah untuk menambahkan kreasi baru dan unik pada setiap produk kerajinan tangan yang di produksi oleh masyarakat tunagrahita, sebaiknya Pemerintah Kabupaten Ponorogo dapat memberikan bantuan berupa dana untuk menunjang berjalannya kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kerajinan tangan di Desa Karangpatihan, serta upah untuk para pelatih kerajinan tangan.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Tunagrahita, Kemiskinan

Abstract

One of the things that cannot be separated from people's life, both in urban and rural areas, is poverty. The problem of poverty that we can find in one of the villages in Ponorogo Regency is Karangpatihan Village, Balong District. This poverty problem is accompanied by the existence of several people who suffer from mental retardation. The creation of the idea of forming a special program to address the problems of poverty experienced by mentally retarded people, the program is called Rumah Harapan, which consists of two types of activities, namely raising animals and handicrafts. The documentation technique is data collection technique in this research which is carried out by searching for data related to research, such as: notes, transcripts, books, newspapers and other data related to community empowerment. The data analysis technique used is data analysis technique according to Krippendorff. For several stages of community empowerment, first, identifying and assessing the potential problem areas and opportunities; second, compiling a group activity plan; third, implementing group activity plans; fourth, monitor the process of activity results. The results of this study indicate that Community Empowerment in Increasing the Income of the Mentally Retarded Community through the Rumah Harapan has been implemented quite well. Suggestion from this research is to add new and unique creations to every handicraft product produced by mentally retarded communities, it is better if the Ponorogo Regency Government can provide assistance in the form of funds to support community empowerment activities through handicrafts in Karangpatihan Village.

Keywords: empowerment, mentally disabled, poorness

PENDAHULUAN

Sumodiningrat (1999) menyampaikan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya menjadikan masyarakat mandiri dengan menyadari potensinya. Sedangkan konsep pemberdayaan menurut Priyono dan Pranaka (1996), manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan menekankan pada proses pemberdayaan masyarakat menjadi budaya dan mendorong atau memotivasi individu agar memiliki kemampuan serta kekuatan untuk menentukan pilihan hidup.

Beberapa konsep pemberdayaan yang paling banyak seringkali membahas bagaimana individu, kelompok atau komunitas dapat membentuk masa depan dan mengontrol kehidupannya sesuai dengan keinginannya. Kesimpulan yang disampaikan menurut Adi (2012:205-206) menyatakan bahwa pemberdayaan juga dapat membantu individu mengidentifikasi metode yang berkaitan dengan upaya mengatasi permasalahan yang dihadapinya, sehingga setiap orang memiliki kekuatan dan kesadaran yang cukup dalam membentuk masa depannya sendiri.

Bentuk pemberdayaan masyarakat yang ada di Indonesia, terdiri dari beberapa aspek yaitu pendidikan, ekonomi, wisata, sistem pengetahuan, agama, kesehatan, pertanian dan budaya. Yang salah satunya adalah pemberdayaan ekonomi. Siagian dalam Iskandar et al (2016) menyampaikan bahwa Indonesia sebagai negara Dunia ketiga yang memiliki kekayaan alam tidak lantas terbebas dari masalah pembiayaan karena keterbatasan dalam menggali kekayaan alam dan mentransformasikannya dari potensi menjadi kekuatan nyata untuk penyelenggaraan pembangunan nasional. Sehingga untuk mengejar ketertinggalan, maka pembangunan nasional difokuskan terhadap pembangunan di bidang ekonomi. Menurut Suhartini (2005) model pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu, dengan pemberian pendampingan kepada warga, pemberian pelatihan, pelaksanaan monitoring, dan evaluasi. Sedangkan menurut Wrihatnolo dan Riant (2007) model pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilakukan melalui membangun kesadaran ekonomi masyarakat, dengan memberikan pencerahan kepada target yang akan diberdayakan. Misalnya memberikan penyadaran kepada kelompok ekonomi rendah di masyarakat tentang pemahaman bahwa mereka dapat menjadi berbeda dan dapat dilakukan jika mereka mempunyai kapasitas untuk keluar dari

kemiskinannya.

Menurut Harahap (2012) salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi di Indonesia yaitu pemberdayaan UMKM dan BUMDes. Pemberdayaan UMKM harus dilaksanakan dengan basis pemahaman potensi daerahnya sehingga dapat diberikan kebutuhan yang sesuai. Sehubungan dengan UMKM, apabila UMKM merupakan usaha yang mengajak partisipasi seluruh atau sebagian besar masyarakat desa sebagai modalnya. Modal berasal langsung dari kekayaan desa atau potensi desa yang dikembangkan. Pemberdayaan ini akan mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya saling membutuhkan. Baik itu komunikasi atau kelangsungan hidup untuk interaksi. Sebagai manusia normal, untuk mencapai kesejahteraan hidup, tentu masih tetap membutuhkan bantuan orang lain. Apalagi bagi mereka yang memiliki kecerdasan rendah seperti keterbelakangan mental atau tunagrahita. Tentunya mereka membutuhkan dukungan, komunikasi, cinta dan motivasi untuk bertahan hidup. Pemerintah telah melakukan upaya untuk mensejahterakan seluruh rakyat, tidak hanya untuk kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, tetapi juga untuk penyandang disabilitas (Hasanah, 2018).

Melalui pemberdayaan masyarakat yang terbaik, pembangunan ekonomi suatu daerah akan meningkat. Mewujudkan kemandirian masyarakat dengan menyadari potensi yang dimiliki masyarakat merupakan upaya dari pemberdayaan. (Hadiyanti, 2008). Rakib dan Agus (2016) menyampaikan bahwa pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan dua kelompok yang saling terakit, yaitu masyarakat sebagai pihak yang memberdayakan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat diharapkan mampu membuat masyarakat menikmati usaha mereka sendiri dan berkomunikasi dengan pihak lain, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat, dan tidak hanya membuat masyarakat selalu bergantung pada berbagai program bantuan. Memandirikan warga masyarakat agar dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya dan dapat meningkatkan taraf hidup keluarga merupakan tujuan akhir dari adanya proses pemberdayaan masyarakat.

Di daerah perkotaan maupun pedesaan, kemiskinan merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Kemiskinan ditandai oleh keterisolasian, keterbelakangan, dan pengangguran yang kemudian meningkat menjadi

antardaerah, antarsektor, dan antar golongan penduduk (Sumodiningrat dalam Nawangsari, 2017) Pemerintah juga harus menekankan dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi peningkatan tajam angka kemiskinan, dengan melalui pembangunan wilayah desa. Pembangunan sumber daya manusia juga perlu ditekankan dan perlu diperhatikan, tidak hanya semata-mata pada pembangunan infrastruktur desa saja. Anggaran pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat juga akan kena imbasnya, jika masih banyak permasalahan kemiskinan yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan data dari situs web Badan Pusat Statistik jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2020 sebanyak 26,42 juta jiwa atau sebesar 9,78%. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 9,41% atau 25,14 juta penduduk. Seperti angka kemiskinan yang terdapat di berbagai Provinsi Indonesia, angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur juga mengalami kenaikan. Badan Pusat Statistik menyampaikan bahwa pada bulan Maret 2020 jumlah penduduk miskin di Jawa Timur mencapai 4.419,10 ribu jiwa (11,09%), jika dibandingkan dengan kondisi pada bulan September 2019 yang sebesar 4.056,00 ribu jiwa (10,20%), maka angkanya bertambah sebesar 363,1 ribu jiwa.

Salah satu Kabupaten yang ada di Jawa Timur yaitu Kabupaten Ponorogo pun tergolong memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi. Menurut situs web Pemerintahan Kabupaten Ponorogo per Maret 2020 warga yang termasuk kategori miskin persentasenya mencapai 10,36% dari jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo. Salah satu Kecamatan yang tergolong miskin di Kabupaten Ponorogo adalah Kecamatan Balong. Kecamatan Balong sendiri memang dikenal sebagai salah satu Kecamatan yang tergolong memiliki penduduk miskin yang cukup banyak, karena memang secara letak geografis Kecamatan Balong berada di dekat lereng gunung yang jauh dari pusat keramaian, sehingga kebanyakan dari masyarakat desanya hanya mampu mencari nafkah dengan cara bertani. Berdasarkan data dari situs web Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, angka kemiskinan di Kecamatan Balong mencapai 61,53%, hal tersebut menjadikan Kecamatan Balong menduduki posisi kedua yang memiliki penduduk tergolong miskin di Kabupaten Ponorogo. Terdapat salah satu desa yang tidak bisa terlepas dari kemiskinan di Kecamatan Balong adalah Desa Karangpatihan.

Terdapat keterkaitan antara kemiskinan dengan fenomena kampung idiot atau tunagrahita membuat Desa Karangpatihan ini menarik untuk dikaji

lebih lanjut. Munawaroh dan Refti (2016) menyampaikan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan munculnya kampung idiot ini adalah karena kemiskinan yang dialami oleh masyarakatnya. Masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi mereka karena kemiskinan yang cukup parah diderita masyarakat Desa Karangpatihan. Puncaknya pada tahun 1960, pada saat banyak terdapat ibu-ibu hamil, krisis pangan terjadi dan menyebabkan masyarakat kekurangan gizi. Minim adanya sosialisasi kesehatan, serta perkembangan otak janin terganggu karena banyaknya masyarakat kekurangan gizi yang cukup parah. Masalah tersebut yang menyebabkan ibu hamil melahirkan bayi dengan *down syndrome* atau keterbelakangan mental. Berdasarkan data dari situs web Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur jumlah penyandang tunagrahita di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2018 mencapai 238 orang.

Masyarakat Desa Karangpatihan sebagian besar hidup sebagai buruh tani berpenghasilan rendah. Mereka akan menganggur dan tidak akan menerima penghasilan apapun setelah musim panen berakhir. Hal ini yang membuat meningkatnya kemiskinan di daerah pedesaan (Munawaroh & Refti, 2016). Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya warga yang masih tinggal di desa meski berpenghasilan kecil, dan mereka tetap memilih bekerja di desa hal tersebut menjadi salah satu contoh pola pikir masyarakat desa yang masih sangat primitif dan terkesan tidak mau berkembang karena tetap berada di zona aman dengan memilih tetap tinggal di desa. Di desa mayoritas masih mengandalkan pekerjaan di sawah pertanian, hal ini dianggap tidak adanya ragam pilihan lapangan kerja lain dalam mata pencaharian mereka.

Bagi seorang tunagrahita, tentu sulit untuk dapat terlibat dalam kehidupan bermasyarakat. Keterbatasan pada diri mereka telah menuntut adanya suatu hal yang disebut dengan kebutuhan khusus, terlebih dalam perkembangan individu maupun sosial, mereka sangat jauh tertinggal untuk dapat menyetarakan langkah dengan yang bukan penyandang disabilitas (Salsabila, 2018). Terkait kesehatan, para tunagrahita juga mendapatkan diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil, meskipun mereka sebenarnya berhak menjalani kehidupan yang sehat. Mereka kesulitan untuk mengakses pelayanan kesehatan yang lebih baik (Kamil et al., 2015).

Irwanto et al (2010) mengemukakan bahwa secara umum, penyandang disabilitas mengalami diskriminasi bukan karena rasa takut atau ketidaktahuan, tetapi karena asumsi bahwa mereka tidak memiliki kapasitas yang sama dengan orang normal dan membantu mereka mengatasi keterbatasan

mereka hanya akan menghabiskan banyak uang. Asumsi tersebut mempersulit penyandang tunagrahita untuk berpartisipasi secara luas di masyarakat.

Menurut Arum dan Rina (2017) beberapa organisasi desa secara mandiri mengedepankan gagasan pemberdayaan masyarakat tunagrahita yang merupakan salah satu solusi atas masalah kemiskinan yang dialami oleh masyarakat penyandang *down syndrome* di Desa Karangpatihan. Masyarakat tunagrahita tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, contohnya seperti mereka tidak mampu membeli beras dan lauk pauk, beberapa hal tersebut adalah awal mula munculnya permasalahan yang ada di masyarakat. Masyarakat tunagrahita hanya bisa mengandalkan program bantuan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan bantuan bersifat konsumtif dari donatur. Jika mereka kehabisan bahan makanan untuk digunakan dan dikonsumsi sehari-hari, serta tidak mendapatkan bantuan, maka mereka akan kembali pada alam, yaitu mengkonsumsi singkong dan jagung.

Pemberdayaan disini diharapkan dapat membuat masyarakat tunagrahita menjadi lebih mandiri bukan malah membuat mereka menjadi semakin bergantung kepada orang lain (Abdullah, 2014). Mampu memberikan pendapatan secara mandiri dan pelatihan kerja bagi masyarakat tunagrahita di Desa Karangpatihan, merupakan tujuan diadakannya pemberdayaan masyarakat miskin dengan *down syndrome*. Pandangan masyarakat yang berpendapat bahwa masyarakat miskin tunagrahita hanya dapat mengandalkan bantuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan mereka dianggap sebagai beban saja diharapkan dapat diubah dengan pemberdayaan masyarakat di Desa Karangpatihan ini.

Upaya pemberdayaan ini dilakukan untuk mewujudkan kemandirian warga tunagrahita. Dengan cara ini, mereka diharapkan tidak lagi mengandalkan bantuan konsumtif yang diberikan oleh orang lain atau orang asing, dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pelatihan program pemberdayaan di Rumah Harapan Desa Karangpatihan ini diikuti oleh warga tunagrahita dari berbagai usia dengan. Munawaroh dan Refti (2016) menyampaikan bahwa terdapat dua model dalam bentuk pemberdayaan masyarakat miskin tunagrahita di desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo yaitu, 1) pelatihan beternak hewan secara mandiri, seperti beternak kambing, ayam, lele, dan lain sebagainya; 2) model kerajinan tangan, pembuatan gantungan kunci, pembuatan batik, pembuatan tasbih, pembuatan

peralatan rumah tangga (sapu, kemoceng, keset), dan lain sebagainya.

Pelatihan beternak hewan secara mandiri salah satunya adalah beternak lele, warga penyandang tunagrahita mengelola kolam yang berisikan 1.000 ekor bibit lele dan memiliki tugas mulai dari memberi makan, membersihkan kolam, hingga mengganti air kolam secara rutin. Masyarakat tunagrahita bisa panen rata-rata tiap tiga bulan sekali dari setiap kolam, sehingga uang hasil panen lele dapat digunakan untuk mendapatkan berbagai macam kebutuhan pokok dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Model pemberdayaan yang lain adalah kerajinan tangan, masyarakat diberi pelatihan untuk membuat beberapa karya kerajinan tangan yaitu membuat tasbih yang terbuat dari manik-manik, membuat keset dari kain perca, membuat Batik Ciprat yang saat ini menjadi batik khas Desa Karangpatihan, membuat alat-alat dapur seperti centong atau sutil yang terbuat dari kayu, dan yang terakhir adalah membuat gantungan kunci. Rumah Harapan akan menampung seluruh hasil produksi kerajinan tangan yang telah dihasilkan masyarakat tunagrahita, lalu kemudian dipasarkan ke beberapa pihak untuk membantu proses penjualan, yang nantinya hasil penjualan akan segera di berikan kepada masyarakat tunagrahita yang sudah membuat kerajinan tangan tersebut. Sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Peneliti lebih fokus ke model yang ke 2 yaitu kerajinan tangan, karena meskipun dengan keterbatasan kemampuan akal dengan adanya pemberdayaan kerajinan tangan diharapkan warga tunagrahita akan memiliki kemampuan dalam membuat kerajinan tangan sehingga mendapatkan sumber pendapatan, serta tidak bergantung pada bantuan orang lain, dan warga tunagrahita mampu melakukannya. Warga tunagrahita akan lebih mudah untuk memperoleh kesejahteraan bagi hidupnya, karena memiliki keterampilan dan lebih mandiri.

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan diatas maka penelitian ini memiliki fokus dan bertujuan untuk mengkaji bagaimana pemberdayaan masyarakat tunagrahita yang ada di desa khususnya Desa Karangpatihan yang dituangkan kedalam judul skripsi penelitian “Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Tunagrahita Melalui Program Rumah Harapan (Studi Kasus di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)”.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah studi literatur. Penelitian ini

dimaksudkan untuk mengetahui informasi yang lebih dalam dan rinci mengenai pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan masyarakat tunagrahita melalui program Rumah Harapan di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Fokus penelitian yang digunakan peneliti adalah beberapa tahapan pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto (2010) yaitu tahapan pertama adalah mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah permasalahan, serta peluang-peluangnya; kedua, menyusun rencana kegiatan kelompok; ketiga adalah menerapkan rencana kegiatan kelompok; keempat, memantau proses hasil kegiatan. Alasan peneliti menggunakan teori tahapan pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto sebagai landasan menentukan fokus penulisan karena melalui teori tersebut peneliti dapat mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan hidup masyarakat tunagrahita yang ada di Desa Karangpatihan.

Peneliti akan melakukan deskripsi berdasarkan data yang diperoleh dari sumber data sekunder. Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari data-data yang berkaitan dengan penelitian, seperti: catatan, transkrip, buku, surat kabar, transkrip dan data lainnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Adapun jurnal dan buku yang digunakan adalah berkaitan dengan pemberdayaan, kemiskinan, tunagrahita dengan kisaran tahun 2008-2020. Teknik analisis data yang peneliti gunakan merupakan teknik analisis data menurut Krippendorff (2004:33) yaitu analisis konten isi dengan cara membandingkan informasi mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada 4 tahapan yang dilaksanakan dalam program pemberdayaan masyarakat tunagrahita melalui kerajinan tangan ini, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah permasalahan, menyusun rencana kegiatan, lalu selanjutnya menerapkan rencana kegiatan, serta yang terakhir adalah memantau proses hasil kegiatan.

1) Mengidentifikasi dan Mengkaji Potensi Wilayah Permasalahan

Tahapan pertama yang dilakukan yaitu mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah permasalahan. Proses mengidentifikasi masalah dilakukan oleh Ketua Kelompok Masyarakat Karangpatihan Bangkit. Identifikasi masalah yang muncul adalah terkait dengan banyaknya masyarakat tunagrahita di Desa Karangpatihan. Andriana (2017) menyampaikan bahwa dari jumlah penduduk Desa Karangpatihan yang

mencapai 8.572 jiwa, terdapat 89 orang diantaranya tergolong tunagrahita tingkat ringan, tunagrahita tingkat sedang, dan tunagrahita tingkat berat yang mayoritas berusia 40 tahun ke atas. Tunagrahita yang ada di Desa Karangpatihan tidak hanya keterbelakangan mental saja namun ada juga yang menderita cacat fisik, seperti buta, bisu dan tuli. Arum dan Rina (2017) menyampaikan bahwa dengan banyaknya masyarakat tunagrahita ini sangat berpengaruh dengan kondisi ekonomi mereka dan lekat dengan kemiskinan. Karena memiliki keterbatasan yang tentunya berpengaruh dalam mencari pendapatan. Para masyarakat tunagrahita sangat kesulitan dalam mencari pekerjaan yang memang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Hasanah (2018) menyampaikan bahwa kondisi warga tunagrahita sebelum adanya pemberdayaan bisa dibilang memprihatinkan, hanya mengandalkan keberlangsungan hidupnya pada keluarga mereka dan bantuan konsumtif dari pihak ketiga. Ada beberapa yang bekerja sebagai buruh tani, tetapi hasil tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap habis masa panen di desa tersebut, para tunagrahita tidak lagi memiliki pekerjaan. Mereka menjadi pengangguran dan hanya bisa berjalan-jalan tanpa mendapatkan penghasilan.

Dari proses identifikasi permasalahan yang sudah disampaikan diatas, mengidentifikasi alternatif pemecahan permasalahan yang terbaik merupakan hal selanjutnya yang perlu dilakukan. Permasalahan masyarakat tunagrahita yang ada di Desa Karangpatihan yang kemudian mendorong semangat Ketua Kelompok Masyarakat Karangpatihan Bangkit untuk memberikan ide baru tentang adanya pemberdayaan kepada masyarakat tunagrahita di Desa Karangpatihan. Harapannya, untuk menjadikan masyarakat tunagrahita mandiri, dengan keterampilan yang dilatih melalui program pemberdayaan.

Masyarakat Tunagrahita yang Mendapat Bantuan Konsumtif



Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Ponorogo

2) Menyusun Rencana Kegiatan

Tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah menyusun rencana kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat melalui kerajinan tangan. Menurut Setiana (2005) sebelum melakukan pemberdayaan yang terpenting adalah dimulai dengan cara bagaimana menciptakan kondisi, suasana serta iklim yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Hadiyanti (2008) menyampaikan bahwa proses pemberdayaan masyarakat bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumber daya setempat sebaik mungkin. Rencana untuk melakukan sebuah pemberdayaan masyarakat tunagrahita di Desa Karangpatihan sudah ada sejak tahun 2002, tetapi baru berhasil dilaksanakan yaitu pada tahun 2012. Berdirinya program pemberdayaan kerajinan tangan ini bermula dari dana pribadi Ketua Kelompok Masyarakat Karangpatihan Bangkit. Bantuan untuk program pemberdayaan masyarakat di Desa Karangpatihan ini hanya dari satu lembaga milik pemerintah yang memberikan kontribusi untuk Rumah Harapan yaitu Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Perdakum) Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Perdakum memberikan bantuan bukan berupa uang atau barang, tetapi semacam pelatihan keterampilan, membuat, membikin kerajinan ganongan dan kerajinan miniatur reyog. Bantuan yang terus menerus datang dan bersifat konsumtif tidak akan pernah membuat masyarakat tunagrahita ini lebih maju dan bisa hidup mandiri. Arum dan Rina (2017) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat tunagrahita melalui Program Rumah Harapan dengan fokus Kerajinan Tangan ini muncul dari ide yang disampaikan oleh Ketua Pusat Latihan Kerja (PLK) Rumah Harapan di Desa Karangpatihan. Pada awalnya terdapat Rumah Kasih Sayang yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang memberikan pelatihan-pelatihan, salah satu pelatihan yang diberikan adalah pelatihan kerajinan keset kepada masyarakat tunagrahita di Desa Karangpatihan, Desa Pandak, Desa Sidoharjo, dan di Desa Kreet. Motivasi untuk mengadakan pemberdayaan masyarakat yang serupa di Desa Karangpatihan muncul karena melihat antusias masyarakat yang mengikuti pelatihan tersebut. Namun tidak hanya kerajinan keset saja tetapi ada pelatihan kerajinan tangan yang lain seperti pembuatan tasbih, anyaman bambu, membuat batik, gantungan kunci, dan lain sebagainya. Dengan adanya keinginan untuk memandirikan dan memajukan masyarakat, terbentuklah pelatihan membuat kerajinan tangan

di Desa Karangpatihan.

3) Menerapkan Rencana Kegiatan

Pelaksanaan rencana kegiatan merupakan tahap kedua setelah penyusunan rencana kegiatan. Kegiatan yang dilakukan pertama kali dalam tahapan merencanakan kegiatan adalah dengan memberikan sosialisasi yang rutin kepada masyarakat tentang apa saja tujuan adanya pemberdayaan masyarakat ini (Arum dan Rina, 2017). Sosialisasi dilakukan oleh Ketua Kelompok Masyarakat Karangpatihan Bangkit dengan beberapa rekan pendamping yang dilakukan melalui pendekatan langsung dan secara personal. Hadiyanti (2008) menjelaskan bahwa sosialisasi program pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang sangat penting untuk menciptakan komunikasi serta dialog dengan masyarakat. Sosialisasi program pemberdayaan pada masyarakat membantu untuk meningkatkan pengertian pada masyarakat dan pihak terkait tentang program tersebut. Diharapkan pendamping dan pelatih dapat berinteraksi dengan warga tunagrahita. Komunikasi sangat penting dan perlu diperhatikan dalam proses pelatihan. Karena disini sasaran yang dituju adalah masyarakat tunagrahita, maka diperlukan komunikasi yang baik agar mereka dapat menerima dan memahami dengan benar intruksi dari pendamping maupun pelatih. Dibutuhkan kesabaran yang tinggi untuk para pelatih dan pendamping masyarakat dalam proses pelatihan pemberdayaan kerajinan tangan. Para pelatih dan pendamping harus benar-benar ikhlas karena tidak ada yang membayar mereka dalam kegiatan membimbing tersebut. Hasanah (2018) menyampaikan terdapat tiga klasifikasi masyarakat tunagrahita di Desa Karangpatihan yaitu, tunagrahita ringan, sedang, dan berat. Masyarakat yang tergolong tunagrahita berat sudah tidak bisa diberdayakan sama sekali, karena untuk memenuhi kebutuhan dasar saja mereka harus bergantung kepada orang lain.

Pelatihan Kerajinan Tangan Membuat Batik Ciprat dan Keset



Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pemerintah Kabupaten Ponorogo

Pelatihan pemberdayaan kerajinan tangan dilakukan secara rutin setiap hari Rabu di Rumah Harapan. Agar masyarakat tunagrahita mampu membuat produk yang bagus, proses pelatihan pun perlu dilakukan berulang kali. Dibutuhkan waktu yang berbeda-beda selama pelatihan, karena sangat bergantung pada kemampuan masing-masing individu. Beberapa dari mereka, ada yang dalam jangka waktu satu minggu sudah bisa menghasilkan produk kerajinan tangan, ada yang satu bulan, dan ada juga yang membutuhkan waktu berbulan-bulan baru bisa membuat produk kerajinan tangan dengan benar.

- 4) Memantau Proses Hasil Kegiatan
- Memantau proses hasil kegiatan merupakan tahapan yang terakhir dalam pemberdayaan ini. Agar prosesnya berjalan sesuai dengan tujuannya kegiatan pemantauan ini dilakukan dengan teliti pada semua tahap pemberdayaan masyarakat tunagrahita. Hadiyanti (2008) menjelaskan bahwa indikator keberhasilan suatu program pemberdayaan adalah meningkatnya kualitas hidup dari peserta program pemberdayaan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program pemberdayaan maka perlu adanya pemantauan atau monitoring yang dilakukan oleh penyelenggara program pemberdayaan. Selama ini pelatihan kerajinan tangan di Desa Karangpatihan berdampak positif bagi masyarakat tunagrahita, kondisi ekonomi mereka sudah jauh berbeda, sekarang masyarakat sudah sangat sibuk melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan yang diberikan Rumah Harapan, itu semua sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari (Arum dan Rina, 2017). Namun dari sisi proses pelatihan, ada beberapa orang yang mengikuti pelatihan tetap mengikuti pelatihan dan ada pula yang tidak mau melanjutkan pelatihan karena keinginan dan kemampuannya sendiri. Hasanah (2018) menyampaikan bahwa proses pemberdayaannya pun cenderung lebih lama jika dibandingkan dengan pemberdayaan pada umumnya, karena yang diberdayakan adalah masyarakat tunagrahita.

Hasil Produksi Kegiatan Pelatihan Kerajinan Tangan di Desa Karangpatihan



Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Ponorogo

Pelatihan kerajinan tangan yang ada di Desa Karangpatihan ini sudah mengalami perkembangan. Awalnya, pelatihan dilakukan secara rutin berlokasi di Rumah Harapan namun sekarang mereka dapat melakukannya di rumah masing-masing tanpa perlu lagi untuk datang ke tempat pelatihan. Beberapa dari mereka ada yang sudah tidak perlu bimbingan dari pendamping lagi karena mereka sudah mampu mengerjakan kerajinan tangan sendiri dengan baik dan benar. Oleh karena itu, mereka diperbolehkan membawa bahan dan perlengkapan yang diperoleh dari Rumah Harapan untuk dikerjakan di rumah masing-masing. Mereka yang diperbolehkan membawa perlengkapan dan peralatan ke rumah mereka masing-masing adalah mereka yang dapat membuktikan bahwa mereka dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan dapat dipasarkan.

Para pendamping harus sesekali mengadakan pelatihan lagi untuk memantau apakah produk yang dihasilkan masyarakat tunagrahita ini layak untuk dipasarkan, karena mengerjakan kerajinan tangan yang dilakukan sendiri di rumah mungkin tidak bisa menghasilkan produk yang bagus dan maksimal. Proses pemantauan atau monitoring dilakukan oleh Ketua Pusat Latihan Kerja (PLK) Rumah Harapan dengan dibantu beberapa pendamping lainnya, dan melakukan monitoring secara kondisional dalam rencana pemberdayaan masyarakat tunagrahita ini. Pelatihan hanya dilakukan untuk memantau hasil kerja dari masyarakat saja, karena pengerjaan kerajinan tangan sudah dilakukan di rumah mereka masing-masing. Namun terdapat beberapa orang yang tidak ingin melanjutkan mengikuti pelatihan kerajinan tangan dari proses pelatihan yang sudah dilakukan, sehingga sampai sekarang ini hanya 22 orang saja yang masih aktif mengikuti program pemberdayaan tersebut. Proses monitoring tidak dilakukan secara rutin, tetapi hanya pada saat ada kunjungan, atau ketika ada waktu tertentu saja,

maupun saat terdapat kegiatan lainnya. Pemantauan dilakukan langsung oleh Ketua Kelompok Masyarakat Karangpatihan Bangkit, terutama dalam promosi dan pemasarannya, serta dibantu oleh pendamping dalam proses pelatihan. Untuk pemasarannya semua hasil produksi yang telah dikerjakan masyarakat akan ditampung di Rumah Harapan, kemudian Rumah Harapan yang akan memasarkan atau menjual kepada para konsumen. Pembagian hasil produksi pada program pemberdayaan ini adalah 50% akan diberikan kepada pembuat (masyarakat tunagrahita), 50% akan dimasukkan kas untuk digunakan perputaran modal kegiatan program pemberdayaan kerajinan tangan tersebut.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, pemberdayaan masyarakat tunagrahita melalui Program Rumah Harapan di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo menggunakan teori Mardikanto yang terdapat 4 tahapan yaitu, mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah permasalahan, menyusun rencana kegiatan, lalu selanjutnya menerapkan rencana kegiatan, serta yang terakhir adalah memantau proses hasil kegiatan.

1) Mengidentifikasi dan Mengkaji Potensi Wilayah Permasalahan

Identifikasi masalah yang muncul pada penelitian ini adalah terkait dengan banyaknya masyarakat tunagrahita yang ada di Desa Karangpatihan. Karena masyarakat tunagrahita memang cenderung memiliki keterbatasan, sehingga membuat mereka kesulitan mendapatkan penghasilan dan membuat mereka lekat dengan kemiskinan. Masyarakat tunagrahita selalu menerima bantuan konsumtif untuk keberlangsungan hidupnya. Banyak masyarakat pula yang bekerja sebagai petani, namun ketika masa panen telah usai banyak dari mereka yang menjadi pengangguran. Hal tersebut yang membuat munculnya ide berdirinya program pemberdayaan di Desa Karangpatihan.

2) Menyusun Rencana Kegiatan

Penyusunan rencana kegiatan dari pemberdayaan masyarakat ini adalah terbentuknya program pemberdayaan kerajinan tangan untuk masyarakat tunagrahita. Masyarakat tunagrahita masih sering bergantung pada bantuan konsumtif yang diberikan oleh pihak ketiga, oleh karena itu dengan adanya pelatihan kerajinan tangan tersebut diharapkan dapat memandirikan dan menambah kreatifitas masyarakat walaupun dengan keterbatasan yang mereka miliki.

3) Menerapkan Rencana Kegiatan

Penerapan rencana kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi. Sosialisasi kepada masyarakat sangatlah penting untuk menciptakan komunikasi yang nyata kepada masyarakat yang mengikuti pemberdayaan. Terlebih masyarakat di Desa Karangpatihan mayoritas adalah tunagrahita, sehingga diperlukan komunikasi yang baik agar mereka dapat mengerti apa sebenarnya tujuan dari pemberdayaan masyarakat yang diadakan di Desa Karangpatihan tersebut. Agar masyarakat tunagrahita mampu menghasilkan produk yang bagus, proses pelatihan pun perlu dilakukan berulang-ulang kali. Waktu pengerjaan pun juga beragam, ada yang satu minggu sudah selesai, ada juga yang sampai berbulan-bulan baru bisa menyelesaikan produksinya. Semua tergantung kemampuan masing-masing yang dimiliki masyarakat.

4) Memantau Proses Hasil Kegiatan

Pemantauan proses hasil kegiatan dilakukan agar program pemberdayaan masyarakat berjalan sesuai tujuannya, karena indikator keberhasilan suatu program pemberdayaan adalah meningkatnya kualitas hidup dari peserta program pemberdayaan. Namun dari sisi proses pelatihan, masyarakat ada yang ingin tetap melanjutkan untuk mengikuti pelatihan dan ada juga yang memilih untuk tidak lagi mengikuti pelatihan tersebut karena sesuai kemampuan mereka masing-masing. Ada saja masyarakat yang merasa kesusahan sehingga sampai sekarang ini hanya 22 orang saja yang mengikuti program pemberdayaan kerajinan tangan tersebut.

Saran

Seharusnya kita juga perlu memberikan rasa perhatian dan kepedulian kita terhadap seseorang yang memiliki keterbatasan mental. Kepedulian bisa disampaikan dengan memberikan pemberdayaan, tidak harus selalu dengan bantuan yang diberikan secara gratis. Maka dari itu dalam penelitian mengenai Pemberdayaan Masyarakat Tunagrahita Melalui Program Rumah Harapan (Studi Kasus di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo), peneliti memberikan beberapa saran yaitu:

1. Bagi Pengurus Rumah Harapan yang berperan sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam memberikan pelatihan kerajinan tangan diharapkan memberikan pelatihan yang menarik kepada masyarakat, sehingga keterlibatan dari masyarakat dapat tumbuh dan dapat lebih aktif lagi. Hal ini perlu diikuti dengan kemampuan dari para pelatih untuk menjadikan pelatihan kerajinan tangan menjadi lebih menarik, yaitu dengan cara menambahkan kreasi baru dan unik pada setiap

- produk kerajinan tangan yang di produksi oleh masyarakat tunagrahita Desa Karangpatihan.
2. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Ponorogo lebih memberikan perhatian terhadap masyarakat tunagrahita di Desa Karangpatihan dengan memberikan bantuan berupa dana guna untuk menunjang berjalannya kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kerajinan tangan agar berjalan dengan lebih baik.
 3. Perlu adanya pemberian upah kepada para pelatih dan pendamping yang sudah meluangkan waktu mereka dalam membimbing masyarakat tunagrahita di kegiatan pelatihan kerajinan tangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H. (2014). *Strategi Pemberdayaan Anak Penyandang Tunagrahita Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya*. 2(3), 2–3.
- Adi, I. R. (2012). *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. PT Raja Grafindo Persada.
- Andriana, L. (2017). Kesejahteraan Sosial Tunagrahita di Ponorogo. *Inklusi*, 4(1), 25.
- Arum, T. S., & Rina, H. H. (2017). Program Pemberdayaan Tunagrahita melalui Kerajinan Keset di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Wacana Publik*, 1(3), 17–22.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2020 naik menjadi 9,78 persen*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo. (2020). *Kecamatan Balong Dalam Angka 2020*. <https://ponorogokab.bps.go.id/publication/2020/09/28/e54048f4f2a7ffe06be2c560/kecamatan-balong-dalam-angka-2020.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2018). *Banyaknya Desa Kelurahan Menurut Keberadaan Penyandang Cacat*. <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/10/1765/-banyaknya-desa-kelurahan-menurut-keberadaan-penyandang-cacat-2018-.html>
- Hadiyanti, P. (2008). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Keterampilan Produktif di PKBM Rawasari, Jakarta Timur. *Perspektif Ilmu Pendidikan*, 17(9), 90–91.
- Harahap, E. F. (2012). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Untuk Mewujudkan Ekonomi Nasional Yang Tangguh Dan Mandiri. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 3(1), 78–96.
- Hasanah, D. R. N. (2018). Analisis Model Pemberdayaan Masyarakat Pada warga Tunagrahita di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. In *Jurnal Masyarakat Madani* (Vol. 3, Issue 2).
- Irwanto, Eva, R. K., Asmin, F., Mimi, L., & Okta, S. (2010). *The situation of people with disability in Indonesia : a desk review*. November, 11.
- Iskandar, D. T., Sumartono, S., & Domai, T. (2017). Evaluasi Program Pembinaan Dan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Ponorogo. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 1(1), 17.
- Kamil, M., Yanti, S., & Sardin. (2015). Education Empowerment Model for the Disabled Learners: A Case Study at Cicendo School for Special Education. *International Education Studies*, 8(7), 139–140.
- Krippendorff, K. (2004). *Content Analysis an Introduction to its Metodology*, Second Edition. Sage Publication.
- Mardikanto, T. (2010). *Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. UNS Press.
- Munawaroh, R., & Refti, H. L. (2016). Praktik Sosial Pemberdayaan Masyarakat Miskin Idiot Melalui Model Kerajinan di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. *Paradigma*, 04(02), 1–10.
- Nawangsari, E. R. (2017). ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA USAHA MENENGAH KECIL DAN MIKRO (UMKM) (Studi di UMKM Pengrajin Batik Kampoeng Jetis dan Pengrajin Koperasi Intako Tanggulangin Sidoarjo). *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 1(1), 12.
- Pemerintahan Kabupaten Ponorogo. (2019). *2020-2021 Tingkat Kemiskinan di Ponorogo Ditekan Menuju Kurang dari 10 Persen*. <https://ponorogo.go.id/2019/07/31/2020-2021-tingkat-kemiskinan-di-ponorogo-ditekan-menuju-kurang-dari-10-persen/>
- Prijono, O. ., & Pranaka, A. M. . (1996). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. CSIS.
- Rakib, M., & Agus, S. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Life Skills Berbasis

Potensi Lokal Untuk Meningkatkan Produktivitas Keluarga Di Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 98.

Salsabila, Z. H. (2018). *Optimalisasi Upaya Pembinaan Diri Warga Tunagrahita dalam Meningkatkan Penerimaan Sosial Masyarakat Indonesia*. 70, 153.

Setiana, L. (2005). *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Ghalia Indoneia.

Suhartini. (2005). *Manajemen Pesantren*. Pustaka Pesantren.

Sumodiningrat, G. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Gramedia Pustaka Utama.

Wrihatnolo, R., & Riant, N. (2007). *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. PT Elex Media Komputindo.